

RENCANA AKSI TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS							PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR	TARGET				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
				I	II	III	IV														
1	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pengarusutamaan Gender	0.94				0.94	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Capaian Kinerja PUG	90	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase kelembagaan PUG	35	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah fasilitasi pertemuan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG PD Provinsi dan Kab/Kota	4	Pertemuan dalam rangka Evaluasi Pembangunan Responsif Gender Provinsi dan Kab/Kota	√			
																Pertemuan dalam rangka pemantapan Pokja PUG Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur		√			
																Pertemuan dalam rangka Pendampingan penyusunan Kebijakan PUG Pokja Kab/Kota se Jawa Timur			√		
																Rapat pembahasan revisi Pergub No. 63 Tahun 2020 tentang RAD PUG				√	
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah fasilitasi Pertemuan dalam Rangka Pelaksanaan PUG PD Provinsi dan Kab/Kota	3	Bimbingan Teknis PPRG bagi Kabupaten/Kota se Jawa Timur		√		
																Bimbingan Teknis PPRG bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur			√		
																Desk Anggaran Responsif Gender Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur				√	

														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan advokasi pelaksanaan PUG kepada pengambil keputusan pemerintahan dan lembaga diluar pemerintahan	5	Pertemuan sosialisasi kesetaraan Gender dengan Perangkat Daerah		√			
																	Pertemuan Fasilitator dan Tim Penggerak tentang Pengembangan Pembangunan Responsif Gender Provinsi Jawa Timur			√		
														Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pendampingan PPRG Tim Penggerak PUG Kab/Kota se Jatim, Auditor, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media	2	TOF lanjutan PUG-PPRG bagi Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Pendamping Kab/Kota		√			
																	Pertemuan sosialisasi PUG dan PA pada Dunia Usaha, Media Massa dan Lembaga terkait				√	
																	Pertemuan Pendampingan PPRG Desa Kabupaten/Kota di Jawa Timur					√
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Capaian indikator kualitas keluarga	50	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah PD yang melakukan kegiatan PPRG tematik	15	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi terkait Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dalam Keluarga	38	Pertemuan sosialisasi kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam keluarga		√			

								Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase kelembagaan daerah yang responsif gender	80	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah mempunyai Data Terpilah	25	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	103	Pertemuan sosialisasi aplikasi data gender dan anak dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur		√		
												Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem pencatatan data terpilah gender dan anak	20				Pertemuan input data bersama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur			√	
														Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Indikator Data Gender dan Anak yang	20	Pembuatan Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Buku Saku Data Gender dan Anak serta KIE Data Terpilah			√	
								Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang menjadi anggota partai politik	16	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat dan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	50	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah kader politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan	80	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan lingkungan kewenangan Provinsi		√		
									Partisipasi angkatan kerja perempuan	52,1		Jumlah kader politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan	100		Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	50	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial dan budaya kewenangan Provinsi			√	
															Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi	81	Pelatihan bagi Kader-kader Partai Politik Perempuan				√

											Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kader Politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan	100	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Juknis PUSPA	100	Penggandaan Buku Juknis PUSPA	√					
												Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	50		Brosur/leaflet tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	450	Brosur/leaflet tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan		√				
															Jumlah Dokumen Buku Panduan SEKOPER	130	Penggandaan Buku Pedoman Sekolah Perempuan (SEKOPER)				√		
															Buku saku Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	950	Buku Saku Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		√				
															Buku Kumpulan Peraturan tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	106	Buku Kumpulan Peraturan tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan						√
									Rasio KDRT	47	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah peserta kegiatan mekanisme pelaporan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	160	Sosialisasi SOP Layanan korban kekerasan perempuan dan anak dan review kelembagaan P2TP2A se Jawa Timur		√	√			
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan	1	Cetak buku saku layanan perempuan korban kekerasan				√		
																	Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan/TPPO		√				

																Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan		√			
									Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Perempuan Korban Kekerasan yang sesuai dengan SOP		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan		Hibah ke PPT Bhayangkara TK.II Mertoyoso Jatim Jl. A. Yani No. 116 Surabaya Jatim	√	√	√	√		
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	100	BOPPA Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan		√	√	√		
									Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	76	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	100	BOPPA Penguatan UPTD PPA		√	√	√		
												Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang	80	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan			√			

		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71.80				71.80	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak yang aktif di Kab/Kota	100.00	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai SK Gugus Tugas KLA dan RAD KLA	38	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah fasitasi kegiatan pada Kluster III dan IV	38	Pertemuan koordinasi pendampingan persiapan verifikasi lapangan Evaluasi KLA Kabupaten dan kota		√		
												Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai kegiatan terkait kegiatan KLA	7				Pertemuan koordinasi persiapan penilaian dan sosialisasi aplikasi evaluasi KLA	√			
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/K ota yang didampingi pada Penilaian Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA	38	Pendampingan Persiapan Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA Kabupaten/Kota	√	√	√	√
															Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Pendampingan Persiapan Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA Kabupaten/K ota	80	Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi				√
															Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi	108	FGD Penyusunan SOP/ Juknis	√	√	√	√
																	Sosialisasi Juknis Sistem Penyelenggara Perlindungan Anak				√
											Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan Kab/Kota yang membentuk Forum Anak	85	Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Peringatan Hari Anak nasional Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	76	Peringatan Hari Anak Tingkat Provinsi Jawa Timur		√		

														Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah peserta Bimtek Pelatihan fasilitator Anak Kabupaten/Kota se Jawa Timur	88	Rapat Pertemuan Forum Anak Daerah se Jawa Timur			√		
																	Bimtek Pelatihan KHA Bagi Fasilitator dan Forum Anak Kabupaten/Kota se Jawa Timur		√			
								Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Forum Anak yang aktif di Kab/Kota	85	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan oleh Petugas terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Advokasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	76	Advokasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)		√			
															Jumlah Peserta Advokasi Sistem Perlindungan Anak	49	Advokasi Sistem Perlindungan Anak		√			
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat pembahasan petunjuk teknis perlindungan anak	17	Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Perlindungan Anak	√				
															Jumlah peserta penguatan kapasitas jejaring perlindungan anak	51	Penguatan Kapasitas Jejaring Perlindungan Anak		√			
																	Pertemuan dan Koordinasi Kerjasama Lintas			√		
																	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak			√		
																	Pendampingan dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO		√	√		

										Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan oleh Petugas terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		√	√		
													Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas Tumbuh Kembang PATBM	60	Peningkatan Kapasitas Tumbuh Kembang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)			√		
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA / PPT / P2TP2A		√			
2	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1.91				1.91	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kab/Kota yang sudah Melaksanakan Program Pengendalian Penduduk	100	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang sudah Mengikuti Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi	38	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Peningkatan peran serta mitra kerja dalam pengembangan Program KKBPK	30	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pengembangan Program KKBPK di 1 Kab/Kota Melalui Pembentukan Kelompok Kerja Distrik Working Group (Pokja DWG)			√	
													Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Sosialisasi GDPK	50	Advokasi dan Sosialisasi GDPK		√			

													Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi tentang Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	50	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat			√		
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kab/Kota yang CPR nya lebih besar sama dengan 80 %	55	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta yang mengikuti Orientasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Pondok Pesantren	38	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta yang memahami materi dan sarana promosi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal yang tersedia	120	Orientasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja di Pondok Pesantren di Kabupaten/Kota	√			
																Orientasi Kesehatan Reproduksi Bagi Pengasuh Pondok Pesantren di Kab/Kota		√		
							Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	Persentase Kab/Kota yang CPR nya lebih besar sama dengan 80 %	50	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah mitra kerja aktif di tingkat provinsi yg diberdayakan di bidang KS	76	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	Jumlah mitra organisasi kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina	130	Fasilitasi Workshop Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Perkawinan Anak		√		
																Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan melalui BKR dalam Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak	√	√		

																Penyusunan Materi Pembelajaran Online Peningkatan Kapasitas Remaja dalam Ketahanan Keluarga			√			
																Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga		√				
																Lomba Pembuatan Film Pendek Penegahan Perkawinan Anak Bekerjasama dengan media			√			
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%				100%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan perekaman KTP Elektronik	100	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan sesuai standar dan tepat waktu	38	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah kab/kota yang mengikuti peningkatan SDM kebijakan pelaksanaan penataan sistim administrasi kependudukan	38	Rapat Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan se Jawa Timur	√				
									Persentase Cakupan Kartu Identitas Anak(KIA)	40		Jumlah kab/kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran	38	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti peningkatan layanan Pendaftaran Penduduk se Jawa Timur	38	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Mikro Registrat Kependudukan	√				
																Up. Dating Data Profil Kependudukan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur			√			
																Laporan Buku Profil Kependudukan			√			
																Monitoring Implementasi Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan ke Kabupaten/Kota	√	√	√	√		

													Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pendaftaran Penduduk di Jawa Timur	38	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP El	√	√	√	√	
										Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP	100	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	38	Rapat Forum Komunikasi Pendaftaran Penduduk se Jawa Timur		√			
																Rapat Koordinasi Kebijakan Penuntasan Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP El se Jawa Timur				√	
													Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	38	Sosialisasi Percepatan Pengurusan Dokumen Kependudukan, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Jalur Pendidikan		√			
								Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	94	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan pencatatan Sipil sesuai standar	100	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pencatatan Sipil di Jawa Timur	38	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran dan Akta Kematian se Jawa Timur	√	√	√	√
																Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Profil Kependudukan di Kab/Kota	√	√	√	√	

										Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP	100	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Pembinaan, Fasilitasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknik, Advokasi, supervisi dan Konsultasi Pencatatan Sipil Kab/Kota	38	Rapat Forum Komunikasi Pencatatan Sipil se Jawa Timur			√		
														Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil Kab/Kota	38	Sosialisasi Percepatan Pengurusan Dokumen Akta Kelahiran dan Kematian Melalui Lembaga Sosial Masyarakat/Panti Asuhan/Perangkat Desa			√	
																	Rapat Asistensi Penyusunan Program Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 Kab/Kota se Jawa Timur				√
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)	2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang Pelayanannya Adminduknya terkonsolidasi dan terintegrasi Big Database berbasis Penunggalan NIK sesuai Standar	38	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur	38	Rapat Koordinasi Kebijakan Sistim Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur		√		
														Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan SDM penyusunan SOP, program kerja, monitoring, evaluasi dan Pengelolaan Data Kependudukan Kab./Kota	38	Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Jawa Timur	√	√	√	√

										Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang sudah mendapatkan Bimbingan Teknik ADB	38	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38	Bimbingan teknik ADB Peningkatan Pengolahan SIAK Pelayanan Excellent di Jawa Timur			√	
											Jumlah buku data kependudukan per semester dan buletin kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	2								
													Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan	2	Kegiatan Pengelola Pelaksanaan Bulletin Kependudukan			√	√
																Kegiatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM)		√	√	√
													Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD, Lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang memanfaatkan Data Kependudukan	4	Rapat Koordinasi Teknis Pengelola Sestim Informasi Administrasi Kependudukan di Jawa Timur			√	
										Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Pelayanan Kependudukan yg telah terkonsolidasi dgn BIG Data	38	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Kependudukan yang telah terkonsolidasi oleh Pusat	152	Administrasi Sestim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	√	√	√	√
																Monitoring Pembangunan Jaringan SIAK On Line		√		

								Program Pengelolaan profil Kependudukan	Jumlah lembaga yg PKS dan memanfaatkan data profil kependudukan Jatim	5	Penyediaan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan Prov. Jatim yg valid dan update	1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah peserta peningkatan SDM dalam rangka Pengembangan Penyelarasan Program Administrasi Kependudukan se Jawa Timur	130	Rapat Koordinasi Pengembangan Penyelarasan Program Administrasi Kependudukan se Jawa Timur		√					
																	Rapat Pemanfaatan Database Kependudukan dengan Instansi Terkait OPD Jawa Timur				√			
													Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Profil Perkembangan Kependudukan yang telah disusun	1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan di Jawa Timur	√	√	√	√				
															Jumlah Profil yang telah diinventarisir dari Kab/Kota	38	Monitoring sinkronisasi kebijakan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan		√					
																	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan di Jawa Timur				√			
																	Monitoring dan evaluasi Implementasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan di Jawa Timur						√	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82.31				82.31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	9 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan							
									Persentase realisasi anggaran	95.60%							Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas PPPA, PPKB dan Kependudukan Provinsi dan kabupaten/Kota							
									Indeks profesionalitas ASN	81.00%				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD							

													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				
													Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				
													Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD				
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	4 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
																Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas PPPA, PPKB, dan Kependudukan Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022				
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Dokumen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Laporan	Penyusunan Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				
													Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Penyusunan Laporan Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 Laporan	Penyusunan Penatausahaan dan pengujian Verifikasi Keuangan SKPD				
													Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi Perangkat Daerah	12 Laporan	Penyusunan Akuntansi SKPD				
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	2 Dokumen	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
													Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	1 Dokumen	Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				

												Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Dokumen	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	1 Paket/LS	Pengadaan Pakaian Dinas					
												Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data pegawai	12 Laporan	Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
												Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	12 Laporan	Monitoring Dan Evaluasi Pegawai					
															Penilaian Kinerja Pegawai					
															Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
												Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai					
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik					
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS	Penyediaan ATK, bahan komputer, perabot kantor					
												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
												Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS	Penyediaan Bahan bangunan					
												Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	1 Paket/LS	Fasilitasi pelayanan Tamu					
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	4 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	1 Paket/LS	Pembiayaan Jasa Tenaga Keamanan, tenaga kebersihan							
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	1 Paket/LS	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan				
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Paket/LS	Pemeliharaan Peralatan kantor							
													Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Paket/LS	Pemeliharaan plafon, ruang server							
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket/LS	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor a							
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket/LS	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor							
													Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Produk Kehumasan yang terverifikasi	100%	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah hasil olah konten dokumentasi Kegiatan Kepala Dinas	1 Paket	Publikasi				